

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan di dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014, menurut pasal 1 ayat (2) “pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konsep desa juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan negara, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-hak masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa merupakan orang yang dipanggil Allah untuk memerintah dan diberikan tugas tanggung jawab untuk memimpin umat Allah dalam mencapai tujuannya. Pemerintah desa dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk menjalin hubungan baik kepada orang lain, dan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah desa serta menjadi teladan

bagi orang lain.<sup>1</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah orang yang dipercayakan masyarakat desa untuk mengatur dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembangunan dalam desa.

Fungsi kepala desa sebagai direktur organisasi (peran birokrasi), dalam pemerintahan desa harus disertai dengan peran lain, yaitu peran legislatif (pembentukan peraturan Desa/Perdesaan), peran anggaran (pembentukan anggaran), pendapatan dan pengeluaran/APBDes), dan peran perencanaan yang membentuk peran kepala desa sebagai perencana pembangunan desa.<sup>2</sup> Kepala desa diharapkan menjalankan semua fungsi pelayanannya. Kedekatannya dengan masyarakat akan berdampak positif dalam pembangunan ketika dapat mengajak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun dan menciptakan desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi. Hal penting saat menjadi kepala desa adalah mengutamakan kepentingan bersama dengan berposisi netral tanpa terikat beban kerja tertentu sehingga dapat bekerja sepenuhnya bagi seluruh masyarakat.

## **B. Undang-Undang Dan Peraturan Mengenai Pemerintahan Desa**

Desa merupakan badan hukum mandiri yang berhak dan memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya sendiri. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, didukung dengan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan

---

<sup>1</sup> Petrus Tiranda, *Implementasi Kepemimpinan Kristen di Rumah Sakit Elim Rantepao Kabupaten Toraja Utara*, vol.5, Paria Jurnal Penelitian Kepemimpinan Kristen, No.1 (2017): 4.

<sup>2</sup> Bintoro Wardiyanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University, 2016),120-124

pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka, desa tidak lagi setingkat administratif, tidak lagi tunduk pada wilayah kekuasaan Kabupaten, akan tetapi menjadi masyarakat yang mandiri, yang masyarakatnya berhak berbicara menurut kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Dasar desa yang tadinya berfungsi sebagai pelengkap dan objek kini berfungsi sebagai aktor. Pada tahun 2014, dalam proses pembangunan Undang-Undang desa No. 6 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, potensi ekonomi lokal dan sumber daya alam melalui pembangunan dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

### **C. Strategi Pemerintahan Desa**

Sebagaimana yang dikutip oleh Handoko mengungkapkan bahwa pemimpin mampu memberikan pengaruh terhadap kepuasan, kenyamanan,

---

<sup>3</sup> <https://jurnal.unigal.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 04.00.

kepercayaan dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan gaya pemerintahan desa yang tepat akan membawa organisasi yang dipimpinnya memperoleh peningkatan kinerja dengan baik.<sup>4</sup>

Efektif tidaknya pemerintahan desa tentu tergantung pada kemampuan dalam membawa tim kepada pencapaian tujuan dalam organisasi.<sup>5</sup> Oleh karena itu pencapaian visi dan misi dalam desa tentu bergantung pada faktor pemimpin dan efektivitas tim kerja. Jadi tujuan pemerintahan desa adalah untuk memahami bahwa pemerintah desa bertugas mengatur sendiri kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keadaan dan sosial budaya itu sendiri.

#### **D. Kepala Desa Sebagai Pemimpin**

Kepala Desa memiliki posisi yang paling penting yang artinya Kepala Desa harus lebih mengakar dan dekat dengan masyarakat, mengayomi dan melindungi warga masyarakat. Di dalam konteks pemerintahan desa, gaya kepemimpinan kepala desa dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyelaraskan tujuan desa. Gaya kepemimpinan kepala desa bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa dan gaya administrasi kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok

---

<sup>4</sup> Rossi Maunofa Widayat, *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 21-22.

<sup>5</sup> Heri Soesanto, *Pemimpin Menciptakan Budaya Unggul Generasi Milenial* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), 10-14.

pengurus kepala desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok pengurusan. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, selalu diperlukan jaminan publik yang berkualitas.<sup>6</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan dalam desa dibutuhkan seorang pemimpin, sehingga dapat terarah dengan baik dalam menyediakan cara dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut .

#### **E. Strategi Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan oleh suatu sekelompok orang menuju kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan pasal 78 (1) Undang -Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan fasilitas desa, dan infrastruktur pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi segala sesuatu yang terjadi di desa dan segala aspek kehidupan masyarakat yang terintegrasi melalui pembangunan gotong-royong.<sup>7</sup> Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan berdasarkan kemampuan dan potensi (SDA), peningkatan kualitas hidup, pengetahuan dan prakarsa masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ibid,4-5.

<sup>7</sup> Ibid, 7.

Proses pembentukan UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengacu pada dua pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta mengurangi kemiskinan dengan menyediakan, kebutuhan dasar, sarana dan prasarana dibangun dan masyarakat pedesaan dikembangkan, menggunakan dan memanfaatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan melalui sumber daya alam dan lingkungan yang memungkinkan. Definisi pembangunan desa dalam keputusan menteri dalam negeri No. 114 petunjuk pembangunan desa tahun 2014, pasal 1 ayat 9, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa semaksimal mungkin.

Pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan yang ditujukan untuk mengubah kondisi yang tidak diinginkan menjadi yang lebih baik. Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal bagi kepala desa dan mesin dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Proses perubahan dan pembangunan masyarakat pedesaan tidak lepas dari campur tangan negara. Jadi cukup jelas bahwa perubahan itu direncanakan oleh Negara (pemerintah), campur tangan negara ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan, agar bangsa tidak tertinggal dari negara lain. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan perkembangan ini, berbagai cara didekati dari

perspektif yang berbeda.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk membawa perubahan di desa diperlukan pembangunan masyarakat.

Strategi pembangunan adalah proses perubahan yang dilaksanakan dengan investasi yang disadari dan direncanakan. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa merupakan merupakan model partisipatif atau sistem manajemen pembangunan dimana refleksi, mufakat dan gotong-royong masyarakat merupakan pola hidup masyarakat yang berakar secara budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Permendagri No. 66 Tahun 2007, ciri pembangunan inklusif adalah pemberdayaan dan partisipatif terencana. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu partisipasi aktif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi merupakan suatu proses yang menawarkan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan inspirasi guna memecahkan berbagai masalah.<sup>9</sup>

Strategi pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup berbagai sektor, sebagaimana yang dijelaskan Kasman dibawah ini, yaitu;

---

<sup>8</sup> <https://csws.fisip.unair.ac.id>, diakses pada tanggal 6 maret 2023 pukul 11.19.

<sup>9</sup> Kasman, Ignatius Adiwidjaja, *Strategi Pemerintahan Desa Dalam mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Vol. 8, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 2, (2019): 1

## 1. Menumbuhkan Pembangunan Masyarakat

### a. Pembangunan Ekonomi

Pemerintahan desa sebagai pimpinan akan selalu melihat keadaan masyarakat, menawarkan bantuan kepada mereka yang berada pada posisi yang kurang mampu, misalnya nasehat bisnis yakni dalam mengelola modal bunga rendah, memberikan pinjaman untuk menambah usaha masyarakat.

### b. Pembinaan Bidang Hukum

Pembinaan bidang hukum di desa dapat berjalan dengan baik, misalnya aparat desa dan pemuda setempat berbicara tentang bahaya narkoba dan memberikan penyuluh kepada pelajar.

### c. Pembinaan Dalam Bidang Agama

Pemerintah desa saling bahu-membahu pembersihan tempat ibadah, yang menjadi perhatian pemerintah desa terhadap kebersihan tempat ibadah tidak lain adalah untuk membangun hubungan kekeluargaan dengan masyarakat.

## 2. Peningkatan Pelayanan Sosial

Pengabdian masyarakat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa dan aparat desa kepada masyarakat, misalnya dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP dan lain-lain.

### 3. Peningkatan Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat merupakan isu terpenting yang mempengaruhi pelaksanaan program atau kebijakan, seperti peningkatan pembangunan desa, yang tidak lepas dari dukungan atau partisipasi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aturan dalam hal ini terutama menyangkut dua aspek, yaitu pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang dapat dicapai dengan seluruh sumber daya organisasi, termasuk program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Prakarsa pembangunan pedesaan untuk mempercepat pembangunan pedesaan, seperti penyediaan sarana dan prasarana, serta upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efisien dan tangguh.<sup>11</sup>

## F. Strategi

### 1. Definisi Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang merupakan kata kerja yang mengacu pada rencana untuk menghancurkan kekuatan musuh melalui penggunaan sumber daya secara efektif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, 3.

<sup>11</sup> Ejournal.unesa.ac.id, diakses pada tanggal 6 maret 2023 pukul 17.48.

<sup>12</sup> Edi Mulyadi, Pengaruh Perumusan dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei pada BUMN yang menderita kerugian), Vol. 21, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, No. 3 (2005).

Strategi adalah proses mendefinisikan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menetapkan metode atau cara kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi juga merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber daya yang tersedia. Strategi merupakan upaya untuk menetapkan tujuan program, proyek untuk mencapai tujuan perencanaan dan tugas-tugas utama.<sup>13</sup>

## 2. Fungsi Strategi

Pada dasarnya tugas strategi adalah memastikan implementasi yang efektif dari strategi yang telah disiapkan. Selain itu ada enam kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mengkomunikasikan tujuan (visi) kepada orang lain.
2. Menghubungkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.

---

<sup>13</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 16.

6. Selalu bereaksi terhadap berbagai situasi baru.<sup>14</sup>

### 3. Manajemen Strategi

Manajemen strategi menurut Michael adalah sesuatu yang menjadikan suatu perusahaan secara keseluruhan lebih dari bagian-bagiannya, sehingga memiliki unsur sinergi, dan menurut H. Igor Ansoff merupakan analisis logis tentang bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan baik dalam bentuk ancaman maupun dalam berbagai situasi. Manajemen adalah proses manajemen yang mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Berdasarkan beberapa definisi di atas, manajemen strategi didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu, dalam menerapkan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan tercapainya tujuan organisasi. Manajemen strategi berfokus pada integrasi manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, manufaktur/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai kesuksesan organisasi.<sup>15</sup>

Tujuan dari manajemen strategi adalah:

1. Menerapkan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.

---

<sup>14</sup> Sofjan Assauri, *Strategi Management*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4-7.

<sup>15</sup> H. Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, *Manajemen Strategi*, (Makassar: Lembaga Perpustakaan, 2016), 5-6.

2. Mengevaluasi kinerja, mengkaji situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi atas penyimpangan dalam implementasi strategi.
3. Selalu memperbarui strategi yang yang cocok untuk pengembangan lingkungan eksternal.
4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari perusahaan yang ada.
5. Selalu melakukan inovasi dan produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.<sup>16</sup>

## G. Visi Misi Pembangunan Desa

Asal mula visi berasal dari bahasa inggris yakni *vision* yang artinya penglihatan.<sup>17</sup> Visi merupakan suatu pandangan terkait tujuan yang akan dicapai perusahaan kedepan atau sebuah rencana yang akan dicapai oleh satu lembaga. Visi biasanya berisi penjelasan singkat, padat dan jelas, tetapi mencakup segala tujuan dan cita-cita suatu instansi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), visi memiliki 5 arti:

1. Kemampuan melihat inti masalah;
2. Perspektif atau wawasan masa depan;
3. Kemampuan merasakan sesuatu yang tidak terlihat melalui kehalusan jiwa dan semangat penglihatan;

---

<sup>16</sup> Ibid, 8.

<sup>17</sup> Moh. Muslim, *Membangun Visi Perusahaan*, Vol. 20 Jurnal Esensi, No. 3 (2017), hlm. 2.

4. Apa yang muncul dalam imajinasi;
5. Pandangan jeli.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Kotler, visi adalah pernyataan tujuan organisasi, tercermin dalam layanan dan produk yang ditawarkan dan dipromosikan, yang biasanya merupakan cita-cita masa depan, nilai, aspirasi, kebutuhan yang dapat dipenuhi, dan layanan kepada kelompok masyarakat.<sup>19</sup>

Visi pembangunan desa merupakan gambaran tantangan dari keadaan desa yang tujuan pada akhir masa perencanaan pembangunan desa yang tercermin dari beberapa hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa yang memperhatikan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategi pembangunan desa merupakan langkah penting dalam jalur pembangunan desa untuk mencapai kondisi yang diharapkan.<sup>20</sup> Jadi, visi merupakan motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuan.

Visi dan misi adalah dua hal yang saling berhubungan, jadi ketika hanya ada satu kata, rasanya tidak benar. Visi adalah gambaran masa depan suatu organisasi atau lembaga. Mendefinisikan visi juga berarti mendefinisikan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. Sedangkan misi adalah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu, pembangunan desa harus lebih digalakkan, karena desa secara keseluruhan merupakan basis

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1004

<sup>19</sup> Moh. Muslim, *Membangun Visi Perusahaan*, Vol. 20 Jurnal Esensi, No. 3 (2017): 2.

<sup>20</sup> <http://desa-bukitraya.penajamkab.go.id>, diakses pada tanggal 6 maret 2023 pukul 13.03.

ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, untuk mencapai tujuan pembangunan desa, dilaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama, serta dari segi pertahanan dan keamanan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk memberikan keleluasan bagi masyarakat, yang meliputi kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan.<sup>21</sup>

Berbagai program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di pedesaan tidak lepas dari peran Badan Penguatan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD). Instansi BPMPD merupakan suatu lembaga utama pemerintah desa untuk menyusun, mengarahkan, merancang, dan mengelola pembangunan dalam desa. Oleh sebab itu, instansi tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah desa menyusun program yang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa.<sup>22</sup>

## H. Hubungan Visi, Misi Dengan Program Kerja

Visi, misi dan program kerja tentu ketiganya mempunyai keselarasan, karena visi menjadi daya penggerak untuk menjalankan misi dan misi dijalankan melalui berbagai program. Visi dan misi organisasi atau lembaga memiliki hubungan erat dengan program kerja yang dilaksanakan. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi atau lembaga.

---

<sup>21</sup> Wela Harni, Agung Suprojo, *Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa*, Vol. 5, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, No. 3 2016): 3.

<sup>22</sup> jurnal.untan.ac.id, diakses pada tanggal 6 maret 2023 pukul 14.13.

Visi yang menggambarkan tujuan jangka panjang dan arah yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga, dengan visi yang jelas memberikan panduan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Misi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama dan fungsi organisasi. Misi memberikan fokus dan tujuan bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Program kerja adalah rangkaian tindakan konkret yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Program kerja merinci langkah-langkah, kegiatan, proyek dan inisiatif yang perlu dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Program kerja merupakan implementasi dari visi dan misi organisasi/lembaga. Jadi, hubungan antara visi, misi dan program kerja sebagai berikut;

1. Visi memberikan arahan jangka panjang bagi organisasi. Program kerja dikembangkan dengan mempertimbangkan visi tersebut dan berfungsi sebagai rencana aksi yang akan mengarahkan organisasi menuju pencapaian visi tersebut.
2. Misi menggambarkan tujuan utama dan fungsi organisasi. Program kerja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam misi organisasi. Jadi, program kerja menjadi alat pelaksanaan yang menerjemahkan misi menjadi tindakan nyata.
3. Program kerja merupakan bagian dari implementasi visi dan misi organisasi/lembaga. Program kerja menguraikan langkah-langkah konkret

yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. program kerja menjadi alat untuk mengukur kemajuan dan mencapai tujuan organisasi/lembaga.

Dengan demikian, visi dan misi menjadi landasan dan panduan dalam merancang program kerja. Program kerja pada intinya untuk menjembatani kesenjangan antara visi dan misi dengan pelaksanaan operasional yang konkret